

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM LAND AQUIZATION AND RESETTLEMENT PLANNING (LARAP) PENGENDALIAN BANJIR KOTA PALEMBANG

by Achmad Syarifudin

Submission date: 22-Jun-2020 11:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 1347839168

File name: 30._Peran_Serta_Masyarakat_-A-SYARIFUDIN-FP.docx (228.86K)

Word count: 1844

Character count: 12272

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM LAND AQUIZATION AND RESETTLEMENT PLANNING (LARAP) PENGENDALIAN BANJIR KOTA PALEMBANG

Achmad Syarifudin

Universitas Bina Darma

Jl. Jend. A. Yani No. 12 Telp. 0711-515582 Palembang

ABSTRAK

Sesuai dengan Program Strategis Kota Palembang, yang salah satunya adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase serta Pengendalian Banjir maka pihak Pemerintah, melalui Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII berupaya melakukan pengendalian banjir Kota Palembang melalui kegiatan "Palembang Flood Control".

Sejalan dengan kegiatan tersebut, perlu dilakukan kegiatan LARAP Pada lokasi rencana Pengendalian Banjir Kota Palembang, sehingga pada saatnya nanti tidak terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pembebasan tanah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Land Aquization And Resettlement Planning (LARAP) Pengendalian Banjir Kota Palembang ini adalah melakukan inventarisasi, pengukuran dan sosialisasi terhadap masyarakat yang lahannya akan terkena pembangunan. Selanjutnya merencanakan lokasi rencana pemindahan dan penempatan masyarakat yang terkena pembangunan.

Kata kunci : Land Aquazation, Resettlement, Planning

PENDAHULUAN

Latar belakang

Kota Palembang dengan luas wilayah 400,61 km² dengan total penduduk sekitar 1.369.239 jiwa adalah Kota Metropolitan yang sangat dinamis, hal ini ditandai dengan perkembangannya yang begitu cepat, sehingga setiap tahun terjadi peningkatan sarana prasarana pemerintahan, sektor perdagangan, jasa, dan permukiman penduduk. Sesuai dengan Program Strategis Kota Palembang, yang salah satunya adalah *Pembangunan Sarana dan Prasarana Drainase serta Pengendalian Banjir*, maka pihak Pemerintah, melalui Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII berupaya melakukan pengendalian banjir Kota Palembang melalui kegiatan "Palembang Flood Control".

Dalam rangka menunjang kegiatan Palembang Flood Control, beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sangat berpengaruh terhadap banjir akan dilakukan pelaksanaan pembangunan sarana pengendali banjir. DAS yang termasuk dalam prioritas penanganan adalah DAS Bendung, DAS Sekanak, DAS Buah, dan DAS Sriguna.

Guna terwujudnya pelaksanaan pembangunan sarana tersebut tentunya akan terdapat beberapa lahan yang akan digunakan sebagai lokasi dari pekerjaan tersebut. Mengingat rencana pekerjaan tersebut lokasinya berada ditengah-tengah Kota Palembang dimana di sepanjang kirikan Sungai Bendung tersebut sudah demikian padat penduduknya, maka mutlak diperlukan adanya suatu rencana yang jelas, tepat dan dengan inventarisasi lapangan yang akurat akan lahan-lahan yang akan dipakai dan memerlukan pembebasan. Tentunya disamping melakukan inventarisasi dan pengukuran akan lahan (tanah dan bangunan) yang akan terkena proyek, juga inventarisasi tentang kepemilikannya. Selanjutnya untuk masyarakat yang lahannya terkena pembebasan juga harus dipikirkan rencana lokasi pemindahan / penempatan kembali pada lokasi pemindahan.

Untuk itu perlu dilakukan kegiatan LARAP Pada lokasi rencana Pengendalian Banjir Kota Palembang, sehingga pada saatnya nanti tidak terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pembebasan tanah.

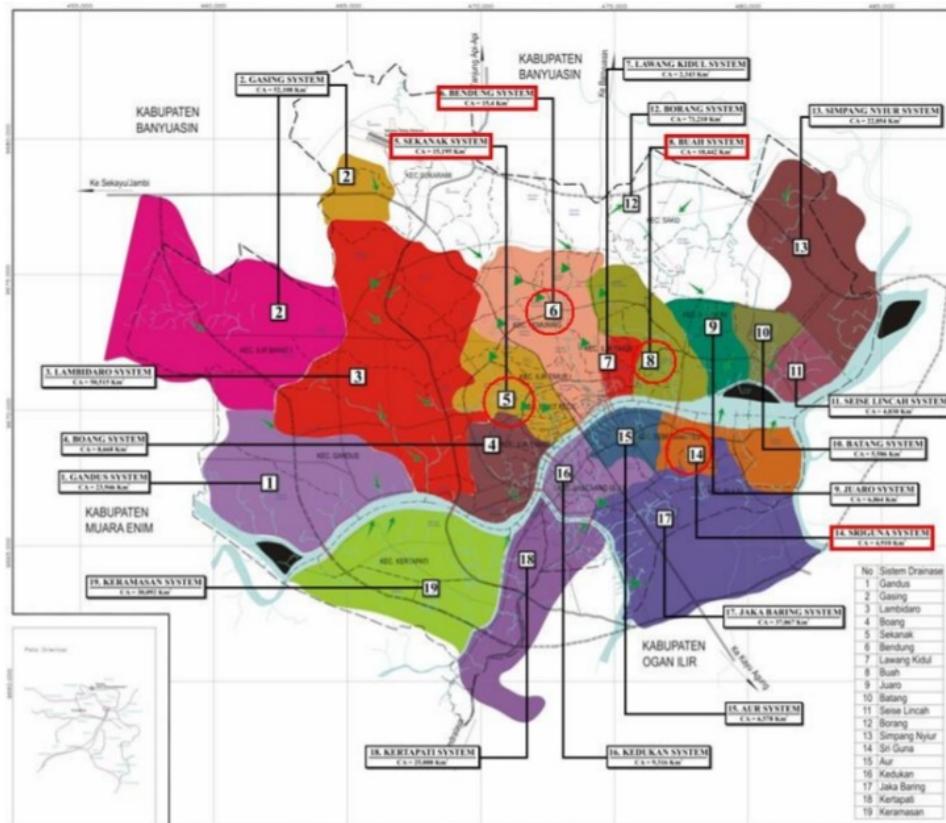
Maksud dan tujuan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Land Aquization And Resettlement Planning (LARAP) Pengendalian Banjir Kota Palembang ini adalah melakukan inventarisasi, pengukuran dan sosialisasi terhadap masyarakat yang lahannya akan terkena pembangunan. Selanjutnya merencanakan lokasi rencana pemindahan dan penempatan masyarakat yang terkena pembangunan.

Sedangkan tujuan kegiatan adalah untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sarana pengendali banjir di Sub DAS Bendung, Sub DAS Sekanak, Sub DAS Buah, Sub DAS Sriguna dapat berjalan lancar dan pada saat pelaksanaan tidak ada lagi yang berkaitan dengan pembebasan lahan (tanah/bangunan)

Ruang lingkup studi

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka upaya mendukung pelaksanaan pengendalian banjir di Kota Palembang harus diperhatikan, antara lain adalah dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan pembangunan (AMDAL), dan status lahan/tanah yang akan digunakan sebagai bangunan (LARAP), guna mengantisipasi hal ini maka perlu segera dilakukan persiapan-persiapan yang dapat mendukung pelaksanaan fisik pembangunan sarana pengendali banjir. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan pekerjaan fisik adalah adanya pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi rencana bangunan. Kota Palembang merupakan Kota Metropolitan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, maka sangat lokasi-lokasi di sekitar sungai telah didominasi oleh bangunan permukiman, sehingga rencana pembuatan bangunan pengendali banjir yang akan dibangun seringkali terkendala akibat lahan yang akan digunakan belum dibebaskan.



Sumber : Studi pengendalian banjir sungai Bendung, 2008

Gambar 1. Sistem Pengendali Banjir Kota Palembang

Lokasi-lokasi yang menjadi prioritas utama dalam pengendalian banjir di Kota Palembang adalah daerah-daerah yang ada dalam Sub DAS Bendung, Sub DAS Sekanak, Sub DAS Buah, dan Sub DAS Sriguna (Gambar-1). Bangunan-bangunan pengendali banjir yang mungkin dilaksanakan adalah pelebaran/pembuatan saluran, pembuatan tanggul sungai, pembuatan kolam retensi, pembangunan stasiun pompa, selain itu di sekitar kanan dan kiri sungai juga direncanakan pembuatan jalan inspeksi sebagai sarana Operasional dan Pemeliharaan (OP) sungai nantinya.

HASIL STUDI SEBELUMNYA

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana pembebasan lahan adalah hasil studi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Studi yang telah dilaksanakan antara lain adalah Penyusunan Masterplan dan Detail Desain DAS Bendung, Sekanak, Buah, dan Sriguna yang telah dilaksanakan oleh Bapeda Kota Palembang bekerjasama dengan LAPI-ITB pada Tahun 2003, kemudian *Study Comprehensif of Musi River Basin* yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum yang bekerjasama dengan CTI-Consultant Pada Tahun 2003-2004, dan terakhir adalah *Review Desain Pengendalian Banjir DAS Bendung dengan Sistem Pompa* yang dilaksanakan oleh BBWS Sumatera VIII yang bekerja-sama dengan PT Sapta Adhi Pratama pada Tahun 2008.

METODE PENDEKATAN

Pendekatan dalam studi ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

- 1) Melakukan Inventarisasi aset terkena proyek
 - a) Jumlah Warga Terkena Proyek, luas tanah, luas bangunan
 - b) Tingkat pendapatan dan pengaruh proyek terhadap mata pencaharian
 - c) Sarana dan Prasarana umum dan sosial
- 2) Melakukan survei sosial ekonomi dengan cara sensus untuk memperoleh informasi mengenai:
 - a) Kondisi, status dan nilai tanah dan bangunan
 - b) Kemungkinan dampak positif dan negatif proyek terhadap warga, persepsi warga terhadap manfaat proyek, pilihan kompensasi dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif proyek
- 3) Melakukan diskusi dengan Pemerintah Kota Palembang dan instansi terkait untuk memberi masukan (input) terhadap hasil inventori dan survei, seperti bentuk, cara penilaian dan besarnya ganti rugi serta upaya-upaya untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan proyek.
- 4) Bersama dengan Pemerintah Kota Palembang melakukan konsultasi dengan warga dan sosialisasi mengenai rencana kerja pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan kepada warga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil survei inventarisasi aset terkena proyek

Sub DAS Bendung

Pembebasan Lahan DAS Bendung
Mulai Dari Jalan Veteran Sampai Muara Sungai Bendung

Jumlah Bangunan			
Lembar Gambar	Kiri Sungai	Kanan Sungai	Keterangan
C-3-4-05	7	9	Dari Jl. Veteran sampai Lr. RRI
D-3-3-01	15	16	Dari Lr RRI sampai Jl. Segaran/Jl. Slamet Riyadi
D-3-1-21	39	31	Dari Jl. Segaran/Jl. Slamet Riyadi sampai Muara S. Bendung
Total		117	

Jadi jumlah Total bangunan yang direkomendasikan adalah 117 bangunan (bagian kanan dan kiri sungai)
Perhitungan dimulai dari hulu ke hilir/searah aliran sungai

Sub DAS Sekanak

Pembebasan Lahan DAS Sekanak
Mulai Dari Jalan Kapten A. Rival Sampai Muara Sungai Sekanak

Jumlah Bangunan			
Lembar Gambar	Kiri Sungai	Kanan Sungai	Keterangan
C-3-4-02	0	1	Dari Jl. Kapten A. Rival sampai Jl. Letnan Mukmin
C-3-2-22	4	4	Dari Jl. Letnan Mukmin sampai Lr. Letnan Jaimas
D-3-2-23	6	2	Dari Lr. Letnan Jaimas sampai Jl. SW Subekti
C-3-2-18	1	6	Dari Jl. SW Subekti sampai Lr. Kosib II
C-3-2-14	4	20	Dari Lr. Kosib II sampai Muara Sungai Sekanak
Total		48	

Jadi jumlah Total bangunan yang direkomendasikan adalah 50 bangunan (bagian kanan dan kiri sungai)
Perhitungan dimulai dari hulu ke hilir/searah aliran sungai

Sub DAS Buah

Pembebasan Lahan DAS Buah

Jumlah Bangunan		
Lembar Gambar	Jumlah Bangunan	Keterangan
D-3-3-23	16	Dari Mushola Istiqomah di Kel. Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang sampai Sungai Buah di Kel. Duku Kec. Ilir Timur II Kota Palembang
D-4-1-02	8	Di Perum Permata Taman Golf Kel. Duku Kec. Ilir Timur II Kota Palembang
Total	24	

Jumlah Total bangunan yang direkomendasikan adalah 24 bangunan

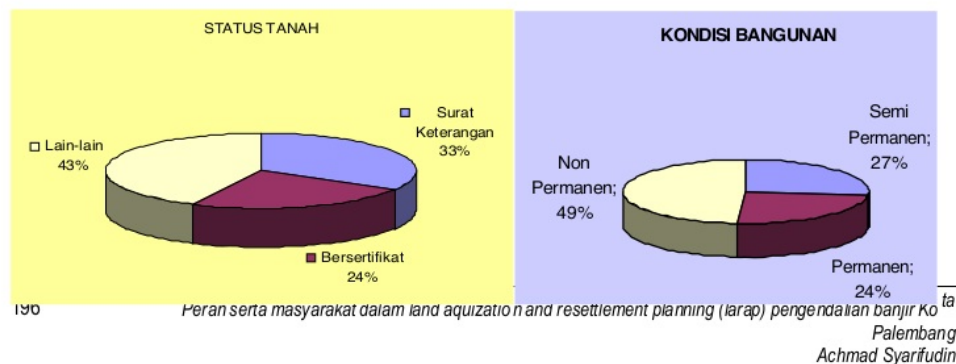
Sub DAS Sriguna

Pembebasan Lahan DAS Sriguna

Jumlah Bangunan		
Lembar Gambar	Jumlah Bangunan	Keterangan
D-3-2-14	7	Dari Jl. Di. Panjaitan sampai Lr. Lama Kel. Bagus Kuning Kec. Plaju Kota Palembang
Total	7	

Jumlah Total bangunan yang direkomendasikan adalah 7 bangunan

Kondisi, status tanah dan bangunan



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi baik pada tahap pra konstruksi (saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk), konstruksi (saat pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja, Mobilisasi alat berat dan bahan konstruksi serta pengoperasian alat-alat) maupun pasca konstruksi dapat diantisipasi dengan rekayasa sosial yang berbentuk antara lain identifikasi karakter dan kelembagaan masyarakat, sosialisasi, konsultasi publik, rembug masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3. Rekayasa sosial dalam mengantisipasi permasalahan sosial pembangunan

No	Saat terjadinya Pemasalahan Sosial	Bentuk Rekayasa Sosial				
		Identifikasi karakter dan kelembagaan masyarakat	Sosialisasi pembangunan	Konsultasi Publik	Rembug Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat
1	Pembebasan Lahan	√	√	√	√	√
2	Pemindahan Penduduk	√	√	√	√	√
3	Pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja	-	√	√	-	√
4	Mobilisasi alat berat dan bahan konstruksi serta pengoperasian alat-alat	-	√	√	√	-

Sumber: Penyusunan Konsep Pedoman Rekayasa Sosial Dampak Pembangunan, 2005

Permasalahan sosial konstruksi dapat diselesaikan dengan pendekatan *Public Participation*, dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah bertindak dengan prinsip fair, kegiatan pembangunan dilakukan dengan transparan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Saran

Masyarakat harus memberikan share, berperan aktif dari tahap perencanaan sampai dengan pemanfaatan pembangunan, serta melakukan kontrol sosial terhadap segala kebijakan yang diambil pemerintah. Sedangkan swasta selalu bertindak peduli, memberikan dukungan bagi setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Wujud kongkrit bentuk *public participation* dalam pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah
 - a) Melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan secara transparan kepada masyarakat yang akan terkena dampak dengan berkoordinasi dengan aparat desa/RT/RW setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM setempat.
 - b) Masyarakat yang akan terkena pembangunan harus dipindahkan dan untuk itu pemindahan harus transparan, agar penduduk di tempat yang baru tidak mengalami kemiskinan, minimal kesejahteraannya sama dengan di tempat yang lama.
 - c) Proses ganti rugi lahan dilakukan secara transparan, demokratis dan adil dengan menggunakan prinsip ganti untung bukan ganti rugi (*win-win solution*).
 - d) Melakukan pembebasan lahan secara serentak untuk menghindari permasalahan sosial yang lebih besar, serta mengantisipasi praktik percaloan. Untuk itu pemerintah harus dapat menyediakan dana pembebasan tanah secara memadai.
 - e) Menyediakan lokasi perpindahan penduduk sesuai dengan keinginan masyarakat, utamanya mempertahankan lapangan pekerjaan penduduk, misalnya sebagai petani.

- f) Memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat yang dipindahkan untuk dapat menjalin hubungan sosial dengan kerabatnya di tempat asal dan di tempat yang baru dengan fasilitasi pemerintah.
 - g) Pemerintah harus memikirkan stabilitas dan kesinambungan mata pencaharian penduduk sebab beralih profesi dari petani menjadi non petani itu tidak mudah, perlu proses yang lama.
 - h) Mengikutsertakan masyarakat desa dalam pembangunan sesuai dengan pendidikan dan keahliannya.
 - i) Memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai kepastian pelaksanaan pembangunan waduk, pembebasan lahan secara serentak.
- 2) Masyarakat
- a) Dalam hal ini, masyarakat yang dipindahkan menginginkan lapangan kerja yang sama, penghasilan juga sama/mendekati, budaya dan pola kehidupan masyarakat dapat terpelihara baik, serta manfaat pembangunan dapat dinikmati sama-sama antara masyarakat yang akan dipindahkan dan masyarakat yang tinggal di tengah dan hilir yang menerima manfaat langsung dari pembangunan.
 - b) Masyarakat mendapat ganti untung yang layak yang antara lain dapat digunakan sebagai modal bekerja untuk memulai kehidupan baru di lokasi baru yang lebih baik di waktu-waktu mendatang.
 - c) Jika masyarakat dipindahkan maka tidak sekedar dipindahkan saja tetapi juga memindahkan sumber kehidupan dan penghidupannya baik secara sosial, ekonomi dan budaya.
 - d) Adanya jaminan bahwa di tempat baru kehidupan akan lebih baik atau paling tidak sama dengan di tempat yang lama.
 - e) Alternatif pemindahan dengan cara transmigrasi atau relokasi di lokasi sekitar pembangunan dengan pola pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara penduduk pendatang dan lokal.
 - f) Jika dilakukan transmigrasi diberi jaminan hidup (Jadup) di tempat kerja baru, paling tidak selama 1 tahun dan bila *resettlement* tidak harus demikian.
 - g) Dilakukan pendampingan masyarakat oleh pemerintah di lokasi pemindahan yang baru untuk pengembangan kehidupan masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya.
- 3) Swasta
- a) Swasta dapat berpartisipasi dalam penyediaan lahan untuk pemukiman baru. Dalam hal ini Perhutani, misalnya dapat berperan dalam penyediaan lahannya dengan fasilitasi dan koordinasi dari pemerintah.
 - b) Berperan serta dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengadaan bibit tanaman untuk penghijauan di daerah hulu agar kerusakan hutan dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) [5] [5] J. Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Remaja Karya, 1989.
- 2) [3] Neil J. Smelser, 1975, *The Sociology of Economics Life*, Second Edition, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Inc, 1975.
- 3) [3] Neuman, W. Lawrence. 2000, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approach – 4th Edition*. Boston : Allyn and Bacon, 2000.
- 4) [3] Pusat Pengkajian Sosial Budaya dan Ekonomi Wilayah Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kimpraswil, 2005, *Laporan Antara Penyusunan Konsep Pedoman Rekayasa Sosial Dampak Pembangunan Waduk*. Jakarta 2005.
- 5) [6] Pusat Pengkajian Sosial Budaya dan Ekonomi Wilayah Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kimpraswil, 2004, *Laporan Akhir Kajian Analisis Dampak Sosial (ANDAS) Pembangunan Waduk*. Jakarta 2004.
- 6) [6] Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1996 tentang *Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Waduk*.
- 7) [7] Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 1982.

TANYA – JAWAB

Pertanyaan :

- 1) Slamet Lestari, ST., MT. – Pus SDA
Bagaimana cara memberdayakan peranserta masyarakat ?

Jawab :

Bentuk peranserta dilakukan dengan memulainya melalui sistem struktural masyarakat, dengan melalui bagaimana kebiasaan mereka serta budaya mereka agar tidak menjadi masalah. Selanjutnya melalui sosialisasi-sosialisasi masyarakat dengan pendekatan tidak langsung dan kelompok-kelompok.

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM LAND AQUIZATION AND RESETTLEMENT PLANNING (LARAP) PENGENDALIAN BANJIR KOTA PALEMBANG

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to School of Business and Management ITB

Student Paper

7%

2

documents.worldbank.org

Internet Source

5%

3

Submitted to iGroup

Student Paper

3%

4

uwadadang.blogspot.com

Internet Source

2%

5

id.scribd.com

Internet Source

1%

6

pt.scribd.com

Internet Source

1%

7

lppm.bsi.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On